

Implementasi Penilaian Kinerja Pppk Guru Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Halongonan Kabupaten Paluta

Eli

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik,²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

eli321@gmail.com

Abstrak

PPPK Guru (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) guru merupakan program pemerintahan yang berarti pegawai ASN yang diangkat dan diperkerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan yang apabila waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai maka masa kerja PPPK Guru bisa berakhir atau diperpanjang sesuai kebutuhan. Maka dari itu Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kinerja PPPK Guru SMA N1 Halongonan Kabupaten Paluta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif diperoleh dari wawancara dengan cara Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber. Berdasarkan Hasil Penelitian ini, diketahui Bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kinerja PPPK Guru Di SMA N 1 Halongonan Kabupaten Paluta masih belum optimal dikarenakan pengimplementasian penyelenggaraan penilaian kinerja PPPK Guru tersebut masih terdapat kendala, pelaksanaan penilaian kinerja PPPK Guru SMA N1 Halongonan Kabupaten Paluta belum bertanggung jawab penuh dalam penilaian kinerja PPPK Guru, dan program proses belajar mengajar cenderung tidak menggunakan desain media pembelajaran karena kurangnya pemahaman menggunakan internet dan fasilitas pendukung di sekolah dan penilaian kinerja PPPK Guru sudah diimplementasi tetapi dampaknya masih kurang dirasakan bagi aspek kehidupan PPPK Guru yang sejahtera dan berkeadilan.

Kata Kunci : *Implementasi, Penilaian Kinerja , dan PPPK Guru*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh suatu bangsa atau Negara dalam membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu-individu agar kelak Negara dapat mewariskan kekayaan budaya atau pemikiran kepada generasi yang memiliki kesadaran tersebut. Terdapat tiga terpenting di dalam dunia pendidikan, yaitu kurikulum, guru dan peroses belajar mengajar. Guru menepati peran sentral dan paling menentukan. Guru merupakan salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan seorang guru memegang tugas ganda yaitu sebagai seorang pengajar sekaligus pendidik.

Sebagai Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru merupakan program pemerintah untuk mengangkat pegawai dengan kontrak kerja pada waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu faktor kunci guna mengembangkan PPPK Guru secara efektif dan efisien. Karena adanya kebijakan atau program penilaian kinerja. Melalui penilaian tersebut, maka dapat diketahui bagaimana kondisi Kenyataan pppk guru dilihat dari kinerja. Dengan demikian data-data ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberhentian dan kelanjutan kontrak PPPK Guru.

Penilaian Kinerja adalah yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. PPPK Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan dan penerapan kompetensinya dalam proses belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu seharusnya Penilaian Kinerja PPPK Guru dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan memerhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku PPPK Guru. Penilaian kinerja PPPK Guru dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja PPPK Guru di bawah kewenangan kepala sekolah. Hasil penilaian kinerja PPPK Guru dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Penguasaan dan penerapan kompetensi tersebut sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran, pembimbingan siswa, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan yang sesuai dengan fungsi sekolah.

Untuk itu memastikan apakah guru melaksanakan tugasnya secara profesional maka perlu dikembangkan sistem penilaian kinerja PPPK guru. Penilaian kinerja PPPK guru diharapkan berimplikasi positif terhadap perbaikan dan peningkatan profesionalisme guru. Penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam setahun, tetapi prosesnya dilakukan sepanjang tahun terutama dalam memantau unjuk kerja guru dalam mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kegiatan penilaian kinerja PPPK guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester. Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan penilaian diri dan kegiatan penilaian kinerja guru pppk adalah 2 semester. Berdasarkan Peraturan pemerintah No.49 Tahun 2018 Tentang penilaian kinerja PPPK Guru tidak hanya mengatur beberapa point saja, tetapi peraturan tentang PPPK Guru juga diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, hak dan kewajiban . pppk hanya dikontrakkan paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang

sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Guru dengan status pppk bisa diberhentikan jika jangka waktu berakhir. Selain itu, PPPK Guru tidak bisa diberhentikan semena-mena karna disetiap penerimaan penetapan dan pemberhentian seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), akan masuk dalam data base ASN di BKN (Badan Kepegawaian Negara) jadi tidak bisa diberhentikan terkecuali dengan alasan tertentu misalnya karena pengurangan PPPK .

Menurut Friedrich (2007: 20) Memandang bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang disusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang disusulkan untuk menggunkan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan ssaran yang diinginkan. Berkaitan dengan penilaian kinerja PPPK Guru Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sangat penting dilakukan oleh para PPPK Guru, sesuai tujuannya yaitu agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien, karena manfaat yang ada pada perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar itu sendiri, yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi. Diskusi ini dilakukan bersama penilai dan yang dinilai. Membahas poin-poin penting yang ada pada RPP dan tujuan dari setiap poin tersebut memberi penjelasan bahwa pada setiap langkah mempunyai tujuan yang khusus dan setiap poin mempunyai tujuan yang berbeda adalah solusi yang paling tepat agar semua pihak yang terlibat memahami akan fungsi, tujuan dan target yang terdapat pada RPP. Penekanan pada setiap poin ini menjadi hal yang penting karena dapat mengajak PPPK guru agar lebih kreatif menyusun RPP.

Kemudian Mendesain media pembelajaran merupakan suatu alat, bahan atau berbagai macam komponen yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dari pppk guru kepada pembelajar (siswa) agar dapat memudahkan pembelajaran dalam menerima suatu materi. Menurut Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 40;2. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. Manfaat media pembelajaran sangat penting bagi siswa. Minat dan motivasi belajar siswa dapat ditimbulkan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Proses belajar yang membosankan dikarenakan guru dalam menyampaikan setiap topik secara monoton dapat dihilangkan dengan menggunakan media yang menyenangkan bagi siswa. model-model pembelajaran yang membuat siswa belajar aktif dan terus menggunakan medsos untuk belajar seperti Youtube.com, WatsApp dan jaringan medsos lainnya.

Walaupun telah ditetapkan peraturan pemerintah no.49 tahun 2018 tentang penilaian kinerja pppk guru di SMA Negeri 1 Halongan kab. Paluta Masih ada terdapat masalah Penilaian kinerja PPPK Guru dalam proses Belajar yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku seperti tidak Objektif, tidak Terukur, tidak Akuntabel dan tidak Transparan. kemudian, Masalah Kritik dan penolakan masyarakat khususnya organisasi guru bermunculan. Seperti, persatuan guru Indonesia (PGRI) dan persatuan Guru Nahdltul ulama (Pergunu), termasuk yang pertama kali

mengkritis keputusan tersebut .Menjadi guru adalah harapan mulia.Masih menjadi mimpi sgenerasi bangsa hingga kini.Menjadi guru PNS Merupakan impian tertinggi bagi para sarjana pendidikan lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Para guru honorer dan calon guru khawatir dan cemas, karena guru honorer akan dihapuskan dan impiannya menjadi PNS tidak akan terbuka lagi oleh Negara kelak sementara itu, data menunjukkan Indonesia tengah kekurangan 1,3 juta guru PNS (ASN) di sekolah negeri sampai 2024(Kemdikbud,2020). Dan kemudian masih banyak PPPK Guru di SMA N 1 Halongonan Kabupaten Paluta yang tidak menggunakan RPP selama proses pembelajaran dikarenakan malu-malu di sebabkan ketidak tahuan akan manfaat dan tujuan menggunakan RPP. Dan ada juga yang menyusun RPP dengan sistem kopas dari internet. Disamping itu juga masalah PPPK Guru di SMA N 1 Halongonan Kabupaten Paluta pada proses belajar mengajar cenderung tidak menggunakan desain media pembelajaran karena kurangnya pemahaman menggunakan internet dan fasilitas pendukung di sekolah seperti IT dan internet.

Untuk kedepannya, diharapkan kepada PPPK Guru lebih memperhatikan dan meningkatkan kompetensi PPPK Guru dengan adanya sistem penilaian kinerja PPPK guru. kompetensi tersebut sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran, pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan yang sesuai dengan fungsi sekolah. Untuk itu memastikan apakah guru melaksanakan tugasnya secara profesional maka perlu dikembangkan sistem penilaian kinerja pppk guru.Penilaian kinerja guru diharapkan berimplikasi positif terhadap perbaikan dan peningkatan profesionalisme guru.

Mengingat ha-hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas tujuan sasaran dari implementasi penilaian kinerja PPPK GURU berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul

“Implementasi Penilaian Kinerja Pppk Guru Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Haholongan Kabupaten Paluta”

2. METODE

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informasi atau narasumber.

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Penilaian Kinerja PPPK Guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Halongonan Kabupaten Paluta berdasarkan fakta-fakta yang akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan yata yang diperoleh.

Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu dari perangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran intitusi, pendapat atau kriteria tertentu. Menurut Wikipedia kategorisasi merupakan proses yang mana gagasan dan benda dikenal, dibedakan, dan dimengerti. Kategoisasi menyiratkan bahwa benda termasuk

dalam tujuam tertentu.Tentu saja sebuah kategorisasi menjelaskan hubungan antara subjek dan objek pengetahuan.

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi karegori penelitian pendukung untuk menganalisis variable tersebut. Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam peimplementasi
- b. Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
- c. Adanya program yang dilaksana dalam implementasi
- d. Adanya dampak bagi aspek kehidupan PPPK Guru

Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Nama : Elvida Yusridawati S.Pd
Umur : 42 Tahun
Jabatan : Kepala Sekolah
2. Nama : Derliana Pane S.Pd
Umur : 39 Tahun
Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bid.Kurikulum
3. Nama : Ibrahim Gani S.Pd
Umur : 29 Tahun
Jabatan : PPPK Guru
4. Nama :Fitri Anggi
Umur :24 Tahun
Jabatan : PPPK Guru

Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengunpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Adapun yang menjadi langkah dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber/responden yang berkaitan dalam penelitian.

b. Data Skunder

Merupakan hasil pengumpulan data yang diteliti yang mempelajari berbagai literature, buku –buku, dokumen-dokumen, maupun catatan tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Setelah data yang terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya dari data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam.Data yang ada dianalisa serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai yang bisa digeneralisasikan.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Halongonan Kabupaten Paluta yang beralamat Jl. Kota Pinang-Gunung Tua Hutaimbaru Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara 22753 dan waktu penelitian direncanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2021.

3. HASIL

Pembahasan

1. Analisis Hasil Wawancara

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam pengimplementasian

Tujuan yang ingin dicapai merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan sumberdaya untuk mencapai suatu sasaran yang ingin diimplmentasikan melalui program atau formulasi kebijakan. Dalam hal penelitian ini pelaksanaannya telah dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah diterapkan. Berdasarkan kebijakan peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kinerja Dalam Rangka PPPK Guru sudah diimplementasikan dan digunakan sebagai pedoman untuk menciptakan PPPK Guru yang profesional, tanggung jawab, jujur dan adil dalam pengembangan tugas sebagai Seorang ASN (Aparatur Sipil Negara). dan akan diakumulasikan dengan perilaku PPPK Guru dilingkungan sekolah untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan karir, pengangkatan, perpanjangan kontrak, penempatan, penghargaan dan disiplin. Dan mewujudkan peningkatan kualitas standar PPPK Guru yang sejahtera dan berkeadilan untuk dapat melaksanakan hak dan tanggung jawab tersebut secara efisien dan efektif. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam pengimplementasian penyelenggaraan penilaian kinerja PPPK Guru tersebut masih terdapat kendala, pada penyelenggaraan program penilaian kinerja PPPK Guru paling sering terjadi adalah kesalahan bagaimana cara menggunakan laporan formati menjadi dasar dalam membangun PPPK Guru pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).

Terkait dengan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pengimplemtasian penyelenggaraan penilaian kinerja PPPK Guru yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Halongonan Kabupaten Paluta Peraturan Pemerintah diterapkan untuk menjadi pedoman untuk menciptakan PPPK Guru yang profesional, tanggung jawab, jujur dan adil dalam pengembangan tugas sebagai Seorang ASN (Aparatur Sipil Negara). dan akan diakumulasikan dengan perilaku PPPK Guru dilingkungan sekolah untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan karir, pengangkatan, perpanjangan kontrak, penempatan, penghargaan dan disiplin. Dan mewujudkan peningkatan kualitas standar PPPK Guru yang sejahtera dan berkeadilan. Khususnya di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Halongonan Kabupaten Paluta.

b. Adanya Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara oleh beberapa narasumber di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. Terkait dari pembahasan ini, dapat disimpulkan pihak yang bertanggung jawab terhadap berjalannya pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penilaian kinerja PPPK Guru yaitu Kepala sekolah, Komite Sekolah, Guru Pembina yang setara dengan kepala sekolah, Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan dinas-dinas yang terkait dalam pelaksanaan penilaian kinerja PPPK Guru dan saling

berkerjasama dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian kinerja PPPK Guru. Tetapi dalam melaksanakan penilaian kinerja PPPK Guru SMA N1 Halongonan Kabupaten Paluta belum bertanggung jawab penuh dalam penilaian kinerja PPPK Guru.

c. Adanya Program Yang Dilaksanakan Dalam Implementasi

Program yang dilaksanakan adalah suatu rencana yang sudah mempunyai suatu tujuan dan sasaran kedepannya dari komitmen semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penilaian kinerja PPPK Guru. Penerapan program yang dilaksanakan belum maksimal sesuai dengan peraturan pemerintah dan masih dalam pengembangan untuk mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Memanfaatkan media pembelajaran sangat penting bagi siswa. Minat dan motivasi belajar siswa dapat ditimbulkan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Proses belajar yang membosankan dikarenakan guru dalam menyampaikan setiap topik secara monoton dapat dihilangkan dengan menggunakan media yang menyenangkan bagi siswa. model-model pembelajaran yang membuat siswa belajar aktif dan terus menggunakan medsos untuk belajar seperti Youtube.com, WhatsApp dan jaringan medsos lainnya.

Terkait dengan pembahasan ini, kepala sekolah memiliki strategi untuk mendukung dan menjalankan program penilaian kinerja untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yaitu dengan berkoordinasi dengan, Komite Sekolah, Guru Pembina yang setara dengan kepala sekolah, Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan dinas-dinas yang terkait dalam pelaksanaan program proses belajar mengajar karena program ini cenderung tidak menggunakan desain media pembelajaran karena kurangnya pemahaman menggunakan internet dan fasilitas pendukung disekolah.

d. Adanya Dampak Bagi Aspek Kehidupan PPPK Guru

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Setiap kebijakan yang telah diterapkan akan menimbulkan pengaruh, baik pengaruh positif maupun negative dimaksudkan pengaruh yang akan diharapkan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Begitupun juga dengan program penilaian akan pengaruh bagi aspek kehidupan PPPK Guru. Berdasarkan wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kinerja PPPK Guru sudah diimplementasikan tetapi dampaknya masih kurang dirasakan bagi aspek kehidupan PPPK Guru yang sejahtera dan berkeadilan. Untuk meningkatkan aspek kehidupan PPPK guru perlu menunjuk untuk menjamin objektivitas prestasi kerja, dengan memerhatikan target, sasaran, hasil, manfaat dan perilaku PPPK Guru, beserta mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru khususnya Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Halongonan Kabupaten Paluta.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian-uraian diatas yang telah dikembangkan pada bab sebelumnya, serta analisis data maka ditarik kesimpulan bahwa kebijakan peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja PPPK Guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Halongonan Kabupaten Paluta dalam rangka pencapaian suatu tujuan dan sasaran di Sekolah Menengah Atas Negeri

1 Halongonan Kabupaten Paluta belum terlaksana sepenuhnya efektif dan efisien, hal ini disebabkan sebagai berikut :

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam pengimplementasian penyelenggaraan penilaian kinerja PPPK Guru tersebut masih terdapat kendala, pada penyelenggaraan program penilaian kinerja PPPK Guru paling sering terjadi adalah kesalahan bagaimana cara menggunakan laporan formati menjadi dasar dalam membangun PPPK Guru pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Dalam melaksanakan penilaian kinerja PPPK Guru SMA N1 Halongonan Kabupaten Paluta belumbertanggung jawab penuh dalam penilaian kinerja PPPK Guru. Dalam pelaksanaan program proses belajar mengajar cenderung tidak menggunakan desain media pembelajaran karena kurangnya pemahaman menggunakan internet dan fasilitas pendukung disekolah Penilaian Kinerja PPPK Guru sudah diimplementasikan tetapi dampaknya masih kurang dirasakan bagi aspek kehidupan PPPK Guru yang sejahtera dan berkeadilan.

REFERENCE

Buku

Fredrich, Jenkins dan E. Anderson, James.2004.*Analisis Kebijakan*.Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal

Ama, D. A. (2021). *Implementasi Kebijakan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2020 dalam Penatalaksanaan Perpindahan PNS Antar Unit Kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan* (Doctoral dissertation).

ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG

ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG.

Anugrah, T. Z. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perpustakaan di Kota Medan* (Doctoral dissertation).

Anshori, A. (2016). Berita Pilkada Dalam Bingkai Media Cetak.

Athoriq, M. I. (2021). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Secara Online di Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation).

Daulay, M. R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

Fauzi, R. (2021). *Pengaruh pendelegasian wewenang terhadap Efektivitas kerja pegawai di kantor camat Sorkam barat kabupaten tapanuli tengah* (Doctoral dissertation, UMSU).

Husmayanti, R. (2021). *Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai* (Doctoral dissertation, UMSU).

Khairiah, N., Nurzannah, N., & Harisman, H. (2018). MODEL PEMBELAJARAN TERPADU DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA MAHASISWA DI KOTA MEDAN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

Krisdayanti, W. (2021). *Pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan* (Doctoral dissertation).

LAWAS, S. K. P., & HASIBUAN, M. D. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN.

- NASUTION, F. A. Pengaruh Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
- Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-Ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143).
- MEDAN, P. K. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR.
- Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Keripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318).
- Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 206-219.
- Saleh, A. (2021). [PROSIDING] KONFERENSI NASIONAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2016: Indonesia Menuju SDGs. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- SIREGAR, A. K. Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.
- SIMEULUE, S. T. K., & PUTRA, R. N. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMK NEGERI.
- Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 61-84.
- Tanjung, I. S., & Hajar, S. (2018). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN MODEL TOTAL QUALITY SERVICE (TQS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2018). PENERAPAN PENDEKATAN PARTISIPATORIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Triadi, F. (2018). *Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syaro'at Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bener Meriah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Viska, A. (2019). *Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
- ZUHRA, A. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN.

Undang-Undang

- Undang –Undang Nomor 49 Tahun 2018 Tentang manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Penilaian Kinerja PPPK Guru
- Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Kependidikan Berkewajiban

Menciptakan Suasana Pendidik Yang Bermakna, Menyenangkan, Kreatif,
Dinamis, dan Motivasi